

Keberlanjutan Pembangunan Wilayah Pesisir di Kabupaten Trenggalek

Sustainable Development of Coastal Areas in Trenggalek District

Lunariana Lubis^{1*}, Agus Wahyudi²

E-mail: lunariana.lubis@hangtuah.ac.id¹, agus.wahyudi@hangtuah.ac.id²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hang Tuah Surabaya

*corresponding author

Dikirimkan: 29-09-2022; Diterima: 23-12-2022; Diterbitkan: 25-01-2023

DOI: <https://doi.org/10.30996/jpap.v8i2.7312>

Abstract

The coastal area is an area that has the potential to be developed, but the coastal area must also be conserved by making efficient use of coastal resources and utilizing the function of the area in a planned and rational manner, including at Prigi Beach in Watulimo District, Trenggalek Regency. The strategy for developing coastal areas in Trenggalek Regency has been stated in Regional Regulation Number 15 of 2012 concerning Spatial Planning of Trenggalek Regency for 2012-2032. This study uses a qualitative method with a case study approach in an effort to understand the sustainability of coastal development in Trenggalek Regency. Data were obtained through observation, documentation, and interviews with the head of Bappeda (Regional Development Planning Agency of Trenggalek Regency) and the community around Prigi Beach, Trenggalek Regency. Data analysis techniques with interactive models are data collection, data condensation, data presentation and conclusion drawing. Aspects of sustainable development in Watulimo District, Trenggalek Regency include (1) ecology, the existence of Prigi Bay provides benefits in the fields of Tourism, Fisheries and Marine, namely Prigi Beach, Damas Beach, Cengkrong Beach, Mangrove Tourism Forest, Karanggongso White Sand Beach and Pearl Beach. (2) the economy, the low income of fishermen in Prigi is also influenced by natural conditions, so that the fishing process cannot take place throughout the year and (3) social, the fishermen community empowerment program in Prigi has been implemented by the Government to improve the fishing community but the program has not running optimally.

Keywords: Sustainable developmet, Coastal Area, Prigi Beach.

Abstrak

Wilayah pesisir merupakan suatu kawasan yang potensial untuk dikembangkan, akan tetapi kawasan pesisir tersebut juga harus dilestarikan dengan melakukan pendayagunaan sumber daya pesisir serta pemanfaatan fungsi wilayah secara terencana dan rasional, termasuk di Pantai Prigi yang berada di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Strategi pengembangan wilayah pesisir di Kabupaten Trenggalek telah tertuang pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam upaya untuk memahami keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir di Kabupaten Trenggalek. Data diperoleh melalui obsevasi, dokumentasi, dan wawancara dengan kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek) dan masyarakat di sekitar pantai Prigi Kabupaten Trenggalek. Teknik analisa data dengan model interaktif yakni pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Aspek pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek meliputi: (1) ekologi, Keberadaan Teluk Prigi memberikan manfaat di bidang Pariwisata, Perikanan dan Kelautan yaitu Pantai Prigi, Pantai Damas, Pantai Cengkrong, Hutan Wisata Mangrove, Pantai Pasir Putih Karanggongso serta Pantai Mutiara. (2) ekonomi, Rendahnya

pendapatan nelayan di Prigi dipengaruhi pula kondisi alam, sehingga proses penangkapan ikan tidak dapat berlangsung sepanjang tahun dan (3) sosial, Program pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah guna meningkatkan masyarakat nelayan akan tetapi program tersebut belum berjalan optimal.

Keywords: Keberlanjutan pembangunan, Wilayah Pesisir, Pantai Prigi.

1. Pendahuluan

Pembangunan saat ini harus dilakukan secara menyeluruh sampai ke daerah pelosok Indonesia. Hal ini dikarenakan pembangunan tidak lagi terpusat pada perkotaan saja (sentralisasi) tetapi juga harus mencapai hingga pelosok desa pada tiap daerah di Indonesia (desentralisasi) (Larasati et al., 2021) termasuk juga pada wilayah pesisir. Pembangunan adalah usaha atau rangkaian usaha terencana untuk pertumbuhan dan perubahan, yang dilakukan secara sadar oleh bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka pembangunan bangsa menuju modernisasi. Pembangunan adalah perubahan mendasar. Sasaran pelaksanaan pembangunan antara lain: keadilan sosial; kemakmuran yang distribusikan secara merata; perlakuan sama di depan hukum; kesejahteraan mental, spiritual dan material; kebahagiaan untuk semua; serta perdamaian dan keamanan (Lailiani, 2017).

Sejauh ini upaya para pelaku (pemerintah, industri dan masyarakat) menuju pembangunan berkelanjutan belum mencapai hasil yang maksimal. Berbagai kendala yang menghambat keadaan tersebut, antara lain belum optimalnya dan terintegrasinya mekanisme operasional pelaksanaan pembangunan berkelanjutan lintas disiplin dan multisektoral, serta belum adanya perangkat yang terpadu dan lengkap untuk mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kepentingan berbagai sektor baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota (Masula et al., 2017).

Wilayah pesisir dengan berbagai ekosistem yang ada di dalamnya merupakan daerah yang produktif dan dimanfaatkan untuk beragam kegiatan pembangunan (Dahuri, 1996) sehingga menyebabkan wilayah pesisir rentan terkena dampak pembangunan. Seiring pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, keberadaan wilayah pesisir kian dipadati permukiman dengan berbagai aktivitas pembangunan yang seringkali tumpang tindih dalam pemanfaatannya, sehingga pada akhirnya menimbulkan permasalahan sosial dan lingkungan hidup. Wilayah pesisir mempunyai beraneka ragam kekayaan alam memerlukan kebijakan yang berkelanjutan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruangnya dengan memperhatikan kondisi geografis, sosial budaya seperti demografi, sebaran penduduk, serta aspek potensial dan strategis lainnya. Hasil dari penyelenggaraan penataan ruang ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang dapat memadukan pilar ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan pemerataan pembangunan.

Aspek keberlanjutan dalam suatu pembangunan merupakan hal yang penting sehingga diperlukan adanya kebijakan yang tepat dalam suatu wilayah. Dalam UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Butir 10 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program.

Konsep pembangunan berkelanjutan menurut Brundtland Commission (1987) adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Pengembangan konsep pembangunan yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan kebutuhan yang wajar secara sosial dan kultural, menyebarkan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi yang berbeda dalam batas kemampuan lingkungan, serta secara wajar semua orang mampu mencita-citkannya. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan jangka panjang yang berfokus pada prinsip untuk menjaga ketersediaan daya dukung alam pada kehidupan manusia secara individu, kehidupan sosial dan budaya manusia, serta kegiatan ekonomi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup pada generasi sekarang dan mendatang. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan harus dilakukan secara inklusif serta memerlukan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan yang memiliki banyak perbedaan atau bahkan seringkali bertentangan untuk melakukan rekonsiliasi menuju sintesis baru secara sinergis melakukan aksi bersama serta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama pembangunan berkelanjutan (Rimadevi et al., 2022). Pendapat lainnya mengenai pembangunan berkelanjutan disampaikan oleh Sughandy, 2000 (Marliana et al., 2013) merupakan proses pembangunan dengan mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan yang menyerasikan aktivitas manusia agar sesuai dengan kemampuan sumber alam yang menopangnya dalam suatu ruang wilayah daratan, lautan dan udara sebagai satu kesatuan. Sehingga jika konsep pembangunan berkelanjutan ini dibawa ke kawasan pesisir merupakan pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan berfokus pada karakteristik ekosistem pesisir yang bersangkutan, dikelola dengan memperhatikan aspek parameter lingkungan, konservasi, dan kualitas hidup masyarakat, yang selanjutnya diidentifikasi secara komprehensif dan terpadu melalui kerjasama masyarakat, ilmuwan dan pemerintah, untuk menemukan strategi-strategi pengelolaan pesisir yang tepat (Kristian, 2019).

Wilayah pesisir dan laut serta beragamnya sumberdaya yang ada memiliki keunikan

sehingga perlu adanya pengelolaan wilayah tersebut secara terpadu bukan secara sektoral. Hal ini dikarenakan (Sompotan, 2016) : (1) secara empiris, terdapat keterkaitan ekologis (hubungan fungsional) baik antara ekosistem di dalam kawasan pesisir maupun antara kawasan pesisir dengan lahan atas dan laut lepas. Sebagai contoh adanya perubahan pada suatu ekosistem pesisir (mangrove misalnya), cepat atau lambat, akan mempengaruhi ekosistem lainnya. Contoh lainnya, jika pengelolaan kegiatan pembangunan (industri, pertanian, permukiman dan lain-lain) di lahan atas suatu DAS (Daerah Aliran Sungai) dilakukan secara berlebihan dalam batas yang tidak wajar dan tidak berwawasan lingkungan maka dampak negatifnya akan merusak tatanan dan fungsi ekologis kawasan pesisir dan laut. (2) dalam suatu kawasan pesisir biasanya terdapat berbagai macam sumber daya yaitu alam dan jasa-jasa lingkungan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan. (3) dalam suatu kawasan pesisir, pada umumnya terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat (orang) yang memiliki keahlian dan minat bekerja yang berbeda, sebagai petani, nelayan, petani tambak, petani rumput laut, pendamping parawisata, industri dan kerajinan rumah tangga, dan sebagainya. Sehingga sangat sukar atau hampir tidak mungkin untuk mengubah pekerjaan sekelompok orang yang sudah secara turun-menurun menekuni suatu bidang pekerjaan. (4) baik secara ekologis maupun ekonomis pemanfaatan suatu kawasan pesisir secara monokultur (*single use*) menjadikan kawasan tersebut sangat rentan terhadap perubahan internal maupun eksternal yang mengarah pada kegagalan usaha. (5) Kawasan pesisir merupakan sumber daya milik bersama (*common property resources*) yang pemanfaatannya dapat dilakukan oleh masyarakat (*open access*). Padahal setiap penggunaan sumber daya pesisir biasanya berprinsip memaksimalkan keuntungan. Oleh karenanya, wajar jika pencemaran, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan konflik pemanfaatan ruang seringkali terjadi di kawasan ini.

Konsep pembangunan sumber daya wilayah pesisir secara berkelanjutan berarti bagaimana mengelola segenap kegiatan pembangunan yang terdapat di suatu wilayah berhubungan dengan wilayah pesisir agar total dampaknya tidak melebihi kapasitas fungsionalnya. Konsep pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu merupakan salah syarat untuk mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Selain itu, juga terdapat kaidah-kaidah yang harus diterapkan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut untuk mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan (Hariyoko et al., 2022).

Teluk Prigi merupakan salah satu wilayah pesisir berada di Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. Keberadaan Teluk Prigi yang lokasinya berada di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek karena telah memberi kemanfaatan di bidang Pariwisata, Perikanan

dan Kelautan. Teluk Prigi memiliki banyak obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi oleh Wisatawana Domestik dan Wisatawan Mancanegara, mulai dari Pantai Prigi, Pantai Damas, Pantai Cengkrong, Hutan Wisata Mangrove, Pantai Pasir Putih Karanggongso serta Pantai Mutiara.

Namun seringkali terjadi pelanggaran pada daerah kawasan pesisir Pantai Prigi pada daerah ini yang kerap kali terjadi penyimpangan berupa eksploitasi sumber daya alam misalnya dengan mengeruk pasir pantai yang dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika hal tersebut terus dilakukan dan tidak ada upaya penanganan yang serius dari pihak pemerintah, maka dikhawatirkan akan terjadi kelangkaan sumber daya hayati di kawasan pesisir tersebut. Serta akan terjadi konflik yang tak terkendali di kalangan masyarakat itu sendiri karena memiliki kepentingan sendiri-sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Creswell, 2015) menampilkan fakta-fakta empiris secara naturalistik mengenai keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir di Kabupaten Trenggalek. Pengumpulan data peneliti menggunakan observasi, dokumentasi untuk memperoleh data primer maupun sekunder yang dibutuhkan dan wawancara dengan kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek) dan masyarakat di sekitar pantai Prigi Kabupaten Trenggalek. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan interaktif (Miles et al., 2014) yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menganalisis keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir meliputi ekologi, ekonomi, dan sosial (Harris et al., 2001). Pembangunan di wilayah pesisir Kabupaten Trenggalek diharapkan mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan, sebagaimana termuat dalam *Report of the World Commission on Environment and Development* yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia saat ini, tanpa menurunkan atau menghancurkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya (Brundtland Commission, 1987).

3. Hasil dan Pembahasan

Pembangunan pesisir yang optimal dan berkelanjutan dapat dicapai dengan upaya pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir sedemikian rupa tanpa melebihi daya dukung (*carrying capacity*) kawasan untuk menyediakannya (Effendy, 2009). Pembangunan pesisir harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga kebutuhan masa kini dapat terpenuhi tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang.

Model pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan *sustainable development* pada kawasan pesisir mengandung tiga unsur utama yang meliputi dimensi ekonomi, ekologi dan sosial (Harris et al., 2001). Suatu pembangunan kawasan pesisir, (A) Secara ekonomi dianggap berkelanjutan (*economic growth*) jika kawasan tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa secara berkesinambungan; (B) Secara ekologis dianggap berkelanjutan (*ecological sustainability*) manakala basis ketersediaan sumberdaya alamnya dapat dipelihara secara stabil, tidak terjadi eksploitasi berlebih terhadap sumberdaya alam yang dapat diperbaharui, tidak terjadi pembuangan limbah melampaui kapasitas asimilasi lingkungan yang dapat mengakibatkan kondisi tercemar, serta pemanfaatan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui yang dibarengi dengan pengembangan bahan substitusinya secara memadai; (C) Secara sosial dianggap berkelanjutan (*social equity*) apabila kebutuhan dasar seluruh penduduknya terpenuhi, terjadi distribusi pendapatan dan kesempatan berusaha secara adil.

A. Keberlanjutan Ekonomi

Keberlanjutan ekonomi dari perspektif pembangunan memiliki dua hal utama keduanya mempunyai keterkaitan yang erat dengan tujuan aspek keberlanjutan lainnya. Keberlanjutan ekonomi makro menjamin kemajuan ekonomi secara berkelanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. Tiga elemen utama untuk keberlanjutan ekonomi makro yaitu efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, dan meningkatkan pemerataan dan distribusi kemakmuran. Hal tersebut diatas dapat dicapai melalui kebijaksanaan makro ekonomi mencakup reformasi fiskal, meningkatkan efisiensi sektor publik, mobilisasi tabungan domestik, pengelolaan nilai tukar, reformasi kelembagaan, kekuatan pasar yang tepat guna, ukuran sosial untuk pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan distribusi pendapatan dan aset.

Keberlanjutan ekonomi sektoral, yakni penyesuaian kebijakan yang meningkatkan keberlanjutan ekonomi makro secara jangka pendek akan mengakibatkan distorsi sektoral yang selanjutnya mengabaikan keberlanjutan ekologis. Hal ini harus diperbaiki melalui kebijaksanaan sektoral yang spesifik dan terarah. Oleh karena itu penting mengindahkan keberlanjutan aktivitas dan ekonomi sektoral. Untuk mencapai keberlanjutan ekonomi sektoral, berbagai kasus dilakukan terhadap kegiatan ekonomi. Pertama, sumber daya alam

yang nilai ekonominya dapat dihitung harus diperlakukan sebagai kapital yang *tangible* dalam kerangka akunting ekonomi, kedua, secara prinsip harga sumber daya alam harus merefleksikan biaya ekstraksi, ditambah biaya lingkungan dan biaya pemanfaatannya.

Kabupaten Trenggalek, suatu daerah yang terletak di pantai selatan Jawa Timur yang memiliki kegiatan laut dengan garis pantai \pm 96 km. Sebagian pantainya berbentuk teluk yaitu terdiri dari Teluk Panggul di Kecamatan Panggul, Teluk Munjungan di Kecamatan Munjungan dan yang paling besar adalah Teluk Prigi di Kecamatan Watulimo (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2009). Potensi wilayah yang dimiliki oleh Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek yaitu (1) pertanian yang berupa padi dan tanaman palawija yaitu Jagung, Ubi Kayu, Kacang Tanah, dan Kedelai. (2) industri yang berupa industri anyaman, industri batu koral, industri pengolahan ikan, industri komponen bangunan dan furniture, dan industri lainnya. (3) pariwisata yang berupa wisata alam dan budaya. Dari potensi inilah daerah kecamatan Watulimo yang merupakan wilayah pesisir sangat potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Potensi-potensi inilah yang harus diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir Kabupaten Trenggalek sehingga hasilnya dapat dinikmati untuk generasi saat ini dan mendatang.

Pertumbuhan sektor perikanan dan pariwisata terletak di selatan Kabupaten Trenggalek yaitu Pantai Prigi. Di Pantai Prigi telah dibangun sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan, yaitu: Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi. PPN Prigi dilengkapi dengan fasilitas pokok berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yaitu TPI barat (940 m²) yang dimanfaatkan untuk pendaratan kapal yang kapasitasnya lebih dari 15 GT dan TPI timur (400 m²) yang dimanfaatkan untuk pendaratan kapal yang kapasitasnya kurang dari 15 GT.

Rendahnya pendapatan nelayan di Prigi dipengaruhi pula kondisi alam, sehingga proses penangkapan ikan tidak dapat berlangsung sepanjang tahun. Pada saat tertentu nelayan tidak melaut dikarenakan antara lain: angin kencang, gelombang besar dan arus laut yang kuat. Keadaan seperti ini seringkali disebut dengan musim paceklik yaitu suatu musim dimana nelayan tidak beraktivitas sama sekali. Sementara untuk mencukupi kebutuhan hidup nelayan maka mereka pinjam ke pedagang atau menjual barang-barang yang dimilikinya. Pinjaman akan dibayar saat musim sudah membaik dan hasil tangkapan ikan melimpah. Dengan perjanjian nelayan harus menjual hasil tangkapan dengan harga yang telah ditentukan oleh juragan atau pedagang. Dampak dari hubungan buruk ini antara nelayan dengan juragan atau tengkulak adalah pada saat musim ikan datang nelayan tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan akibatnya, utang tidak bisa dilunasi dan menumpuk karena pada musim paceklik berikutnya nelayan mengutang lagi.

Pembangunan kawasan di Prigi yang dilakukan oleh pemerintah pusat pada tahun 2001, sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan fungsi dan pelayanan perikanan. Akan tetapi belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional karena cenderung berorientasi pada target secara ekonomis. Yakni mengejar target pendapatan daerah dari sektor kelautan dan perikanan.

Realita ini tampak dari jenis kegiatannya yang lebih memihak pada kaum kapitalis atau pengusaha dibidang kelautan dan perikanan, seperti pembangunan pelabuhan, tempat pelelangan ikan dan fasilitas keperluan operasi penangkapan ikan. Sementara pembangunan Kawasan di Prigi hanya menekankan pada aspek fisik saja, dan belum banyak memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan kesejahteraan nelayan yang ada disekitar Prigi. Hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan tempat pelelangan ikan.

B. Keberlanjutan Ekologis

Menurut Bengen (2004) pembangunan sumber daya pesisir dan lautan secara optimal dan berkelanjutan terwujud apabila memenuhi tiga persyaratan ekologis: (1) pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan yang sesuai dengan daya dukungnya; (2) pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan lautan yang harmonis; dan (3) pemanfaatan kapasitas asimilasi wilayah pesisir sesuai dengan daya dukung lingkungan.

Keberadaan Teluk Prigi yang berada di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek memberi manfaat di bidang Pariwisata, Perikanan dan Kelautan. Teluk Prigi memiliki banyak obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi oleh Wisatawan Domestik dan Mancanegara yaitu Pantai Prigi, Pantai Damas, Pantai Cengkong, Hutan Wisata Mangrove, Pantai Pasir Putih Karanggongso serta Pantai Mutiara.

Selain mempunyai wisata pantai, Kabupaten Trenggalek juga mempunyai wisata hutan mangrove yang terletak di muara Sungai Pancer, Cengkong, Trenggalek. Wisata mangrove ini merupakan salah satu destinasi wanawisata yang akan dikembangkan Perum Perhutani sebagai kawasan ekowisata percontohan yang produktif. Kawasan pesisir yang dihiasi hutan bakau seluas kurang-lebih 31 hektare dan masih masuk wilayah pengelolaan Perhutani itu dinilai memiliki nilai ekonomi wisata yang tinggi. Tidak hanya letak geografisnya yang berdekatan dengan obyek wisata Pantai Prigi dan Pasir Putih yang lebih dulu terkenal, tetapi juga memiliki nilai jual tinggi karena panorama hutan bakaunya yang terkenal. Pada dasarnya Cengkong memiliki dua tempat wisata, yaitu Hutan Mangrove dan Pantai Cengkong.

Namun luasan hutan mangrove di Kawasan Pancer Bang telah mengalami penurunan yang signifikan. Pada awalnya, dapat diidentifikasi bahwa ada sejumlah enam lokasi hutan mangrove di Teluk Prigi (Susilo et al., 2015). (1) di Karanggongso yang sekarang telah menjadi

pemukiman penduduk. (2) di Pancer Ledong, yang saat ini digunakan sebagai kawasan pelabuhan perikanan. (3) di Pancer Ngemplak, saat ini kondisinya tidak baik karena terkena erosi aliran sungai. (4) di Pancer Cengkong, yang saat ini sedang dalam proses pemulihan yang dikelola oleh Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) “Kejung Samudra”; yang luasnya mencapai 87 ha. (5) di Pancer Cengkong dan (6) di Pancer Bang; lokasi ke-5 dan 6 telah mengalami alih fungsi lahan sebagai perkebunan kelapa, luasan mangrove saat ini tinggal kurang dari 25% dari semula (luas semula kurang lebih 10 ha).

Pada pengamatan yang dilakukan pada tahun 2021 bahwa ancaman penurunan luasan mangrove di Pancer Bang juga oleh abrasi pantai. Proses abrasi membawa pasir ke sungai yang mana tumbuhan mangrove berada di tepian sungai tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Musyawarah Desa Hutan (LMDH) Argo Lestari untuk melakukan pengerukan sungai dan membuat tanggul penghalang gelombang tidak mampu menghentikan abrasi pantai. Sejumlah bibit mangrove yang disediakan oleh masyarakat untuk reboisasi sejumlah kurang lebih 1.500 batang, yang dilakukan tahun 2011, pada tahun 2013 masih ada. Sekarang bibit itu telah tidak ada.

Berbeda kondisinya dengan hutan mangrove di Pancer Cengkong, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur merupakan salah satu kawasan konservasi. Lokasi tersebut terletak di sebelah selatan kawasan Wisata Pantai Karanggongso dan Pantai Prigi. Luas kawasan konservasi mangrove di Cengkong sejak awal dikelola sampai sekarang terus berkembang hingga \pm 100 Ha. Hutan Mangrove Pancer Cengkong dikelola oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Kejung Samudra yang merupakan kelompok atau organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan peranan dan partisipasi masyarakat pantai di dalam pembangunan perikanan sehingga terwujud masyarakat pantai yang sejahtera. Di dalam perkembangannya Kawasan Hutan Mangrove Pancer Cengkong sebagai kawasan konservasi semakin menarik minat masyarakat menjadi salah satu tempat wisata di Kabupaten Trenggalek. Pentingnya antisipasi pada isu lingkungan yang khusus pada kawasan mangrove harus dilakukan bersama antara masyarakat petani dengan pihak-pihak yang berkepentingan (Alfizar, 2016).

C. Keberlanjutan Sosial

Keberlanjutan sosial dan budaya mempunyai empat sasaran yaitu ; (a) Stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat peranan dan status wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga ; (b) Memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan memerangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan absolut. Keberlanjutan pembangunan tidak mungkin tercapai bila

terjadi kesenjangan pada distribusi kemakmuran atau adanya kelas sosial. Halangan terhadap keberlanjutan sosial harus dihilangkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kelas sosial yang dihilangkan dimungkinkannya untuk mendapat akses pendidikan yang merata, pemerataan pemulihan lahan dan peningkatan peran wanita ; (c) Mempertahankan keanekaragaman budaya, dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa, dan dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan pembangunan ekonomi ; (d) Mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Tujuan akhir yang diusahakan tersebut pastinya mengalami banyak tantangan, perlu adanya proses kolaborasi antar aktor dalam antisipasi dan penanganannya (Asrofi et al., 2017). Kelompok masyarakat punya potensi tersebut perlu melakukan pelebagaan secara sadar pada proses pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir (Masula et al., 2017).

Dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi yang peran masyarakat diwakili oleh LSM dan kelompok masyarakat. Berdasarkan fakta lapangan masyarakat mempunyai peran yang sangat kecil bahkan keterlibatan mereka hanya sebagai formalitas saja. Pertama, menyangkut peran LSM dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi yang mana LSM merupakan wakil dari masyarakat nelayan tidak dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan program pemberdayaan. LSM hanya sebagai pelaksana program dari Dinas Kelautan dan Perikanan, peran yang dilaksanakan LSM merupakan bentukan dari dinas. Dengan bentukan peran dari dinas peran LSM sangat sempit sehingga mempersulit ruang gerak LSM dalam proses pemberdayaan. Kedua, kelompok masyarakat. Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial. Pembentukan kelompok dalam pemberdayaan masyarakat nelayan mempunyai tujuan yaitu untuk mengkoordinir masyarakat nelayan. Namun dalam prakteknya tidak semua nelayan tergabung dalam kelompok hal ini dikarenakan kelompok yang terbentuk bukan karena inisiatif masyarakat sendiri, kelompok terbentuk akibat dari sebuah program yang menuntut terbentuknya sebuah kelompok. Dalam pemberdayaan masyarakat nelayan Prigi, keterlibatan masyarakat nelayan hanya sebagai penikmat program, masyarakat tidak diajak dalam proses perencanaan, sehingga untuk menjamin keberlangsungan program sangat rawan.

Banyak program pemberdayaan yang notabene sebagai program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat (*bottom up*), tetapi kenyataannya masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan program-program tersebut sehingga tidak aneh banyak program yang hanya seumur masa proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat.

4. Simpulan

Keberlanjutan dalam pembangunan bukanlah konsep yang sederhana, melainkan konsep yang kompleks karena banyak hal yang perlu diperhatikan dan saling terkait. Karena pemahaman yang lebih baik tentang pembangunan berkelanjutan menjadi penting, terutama bagi para pembuat kebijakan, baik di tingkat makro maupun mikro, guna mencapai tujuan pembangunan.

Kabupaten Trenggalek merupakan salah bagian wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur yang memiliki wilayah pesisir yang sangat potensial untuk dikembangkan dan dijaga kelestariannya diantaranya adalah Teluk Prigi yang memiliki beberapa tempat wisata, antara lain Pantai Prigi, Pantai Karanggongso, Pantai Mutiara, Pantai Damas, Pantai Cengkronng dan Hutan Mangrove. Terdapat 3 (tiga) aspek keberlanjutan (suistanaable) dalam pengembangan potensi pesisir Pantai Prigi yang berada di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, yakni keberlanjutan ekologis, keberlanjutan ekonomi, dan keberlanjutan sosial. Dari segi ekologi, keberadaan Teluk Prigi menawarkan keuntungan bagi pariwisata, pemancingan dan pelayaran. Diantaranya Pantai Purigi, Pantai Damas, Pantai Cengklong, Hutan Mangrove, Pantai Pasir Putih Karangonso dan Pantai Mutiara. Dari segi ekonomi, rendahnya pendapatan nelayan Prigi juga dipengaruhi oleh kondisi alam yang membuat mereka tidak bisa menangkap ikan sepanjang tahun. Sedangkan aspek sosialnya, Program pemberdayaan masyarakat nelayan yang telah ada belum berjalan maksimal.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran diberikan kepada pemerintah Kabupaten Trenggalek diharapkan untuk merencanakan program/kegiatan yang lebih variatif terkait dengan kebijakan pengembangan wilayah pesisir secara berkelanjutan, serta melakukan percepatan untuk pembuatan regulasi yang secara khusus mengatur mengenai wilayah pesisir. Pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Trenggalek memerlukan adanya prioritas kegiatan sehingga kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan rencana yang matang dan dapat berkesinambungan. Prioritas kegiatan yang nantinya akan dibuat haruslah berdasarkan pada tingkat urgensitasnya.

5. Referensi

- Alfizar, F. (2016). Studi Kasus Pada Wisata Mangrove Wonorejo. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(2), 393–406. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jpap.v2i02.998>
- Asrofi, A., Hardoyo, S. R., & Sri Hadmoko, D. (2017). Strategi Adaptasi Masyarakat Pesisir Dalam Penanganan Bencana Banjir Rob Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan*

Nasional, 23(2), 1. <https://doi.org/10.22146/jkn.26257>

- Bengen, D. (2004). *Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut serta Prinsip Pengelolaannya*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor.
- Brundtland Commission. (1987). The World Commission on Environment and Development. In *Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development* (Vol. 4). Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset : Memilih di antara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar.
- Dahuri, R. (1996). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. PT. Pradnya Paramita.
- Effendy, M. (2009). Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu: Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya dan Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Wilayah Pesisir Yang Optimal dan Berkelanjutan. *Jurnal Kelautan*, 2(1), 81–86.
- Hariyoko, Y., Puspaningtyas, A., Nirmala, E. R., & Larasati, N. (2022). Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Sektor Unggulan Kota Surabaya dalam Masa Pandemi Covid-19. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 06(2), 84–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n2.p84-90>
- Harris, J., Wise, T., Gallagher, K., & Goodwin, N. R. (2001). *A Survey of Sustainable Development : Social And Economic Dimensions*. Island Press.
- Kristian, I. (2019). Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat. *Jurnal Rasi*, 1(1).
- Lailiani, B. A. (2017). Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pembangunan Desa (Studi pada Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2), 790–798. <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1261>
- Larasati, N., Ria, C. A. K., & Kusnan. (2021). Pembangunan Desa Berkembang Sebagai Desa Sejahtera dan Mandiri dalam Perspektif Administrasi Pembangunan dan Dynamic Governance. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(1), 1–14.
- Marliana, D., Sarwono, & Razikin, M. (2013). Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Sustainable Development di Kabupaten Sampang (Studi pada BAPPEDA Kabupaten Sampang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(3), 80–86. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/96>
- Masula, I. C., Indartuti, E., & Soenarjanto, B. (2017). Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jember (Studi Kasus Strategi Pengembangan Wisata Pantai Puger Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(1), 680–689. <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i1.1239>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods*.
- Rimadevi, G., Indah Mindarti, L., & Hanafi, I. (2022). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Pembangunan Berkelanjutan di Pantai Ngliyep Kabupaten Malang (Studi

pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), 184–192. <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/1246>

Sompotan, H. B. (2016). Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(7), 1–7.

Susilo, E., Purwanti, P., & Lestariadi, R. A. (2015). Keberlanjutan “Kejung Samudra” dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Mangrove Di Pancer Cengkong Dan Damas, Pantai Prigi, Trenggalek. *Jurnal Kebijakan Sosek KP*, 5(2), 19–25.